



Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Modal Kerja terhadap Kinerja Keuangan UMKM Makanan dan Minuman di Kuningan

Haifa Destiya Arofah, Munawaroh, Fitriyasari
Universitas Muhammadiyah Cirebon

haifadestiya@gmail.com, munawaroh@umc.ac.id, fitriya@umc.ac.id

Abstrak

UMKM sektor makanan dan minuman memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi kinerjanya dapat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah dan kemampuan pengelolaan sumber daya internal, termasuk modal kerja. Dalam konteks Kabupaten Kuningan, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang dapat memengaruhi aktivitas usaha UMKM makanan dan minuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah dan modal kerja terhadap kinerja keuangan UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM sektor makanan dan minuman. Sebanyak 145 responden diperoleh, kemudian empat data outlier dikeluarkan sehingga 141 responden digunakan dalam analisis. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan ukuran minimum berdasarkan rumus Lemeshow sebanyak 97 responden. Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics melalui uji validitas, reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji F, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM dengan koefisien regresi sebesar 0,400 dan nilai t sebesar 8,264 dengan signifikansi 0,000. Modal kerja juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien regresi sebesar 0,621 dan nilai t sebesar 10,597 dengan signifikansi 0,000. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,703 menunjukkan bahwa 70,3% variasi kinerja keuangan UMKM dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh kebijakan pemerintah dan modal kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dan modal kerja merupakan faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kuningan.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah; Modal Kerja; Kinerja Keuangan; UMKM

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food and beverage sector play an important role in community economic activities, but their performance can be affected by government policies and internal resource management, including working capital. In Kuningan Regency, the Free Nutritious Meal (MBG) Program is one government policy that may influence the activities of food and beverage MSMEs. This study aims to analyze the effect of government policy and working capital on the financial performance of food and beverage MSMEs in Kuningan Regency, West Java. This study employs a quantitative method with descriptive and associative approaches. Data were collected through questionnaires distributed to food and beverage MSME owners. A total of 145 respondents were obtained, with four outliers excluded, resulting in 141 respondents for analysis. The sampling technique used was purposive sampling, with a minimum sample size of 97 respondents based on the Lemeshow formula. Data were analyzed using IBM SPSS Statistics through validity, reliability, classical assumption, multiple linear regression, F-test, t-test, and coefficient of determination tests. The results show that government policy has a positive and significant effect on financial performance, with a regression coefficient of 0.400, t-value of 8.264, and significance value of 0.000. Working capital also has a positive and significant effect, with a coefficient of 0.621, t-value of 10.597, and significance value of 0.000. The Adjusted R Square of 0.703 indicates that 70.3% of the variation in MSME financial performance is jointly explained by government policy and working capital.

Keywords: Government Policy; Working Capital; Financial Performance; MSMEs

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat (Hardani et al., 2020). Dalam konteks penelitian ini, UMKM sektor makanan dan minuman di Kabupaten Kuningan menghadapi perubahan lingkungan usaha seiring dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai kecamatan menunjukkan bahwa

implementasi program tersebut telah menjangkau wilayah yang cukup luas. Kabupaten Kuningan disebut memiliki sekitar 150 SPPG, dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Kuningan relevan untuk mengkaji hubungan antara kebijakan pemerintah dan aktivitas ekonomi UMKM sektor makanan dan minuman.

Keberadaan SPPG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi pelaku usaha di sekitarnya. Distribusi makanan bergizi dapat menyebabkan sebagian siswa dan masyarakat mengurangi pembelian makanan dari UMKM sekitar sehingga berpotensi memengaruhi penjualan dan pendapatan usaha. Di sisi lain, penggunaan bahan pangan oleh SPPG juga berpotensi memengaruhi harga beberapa bahan baku. Perubahan kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan usaha UMKM dapat mengalami perubahan akibat kebijakan pemerintah, sehingga faktor eksternal dan internal perlu diperhatikan dalam mempertahankan kinerja keuangan usaha.

Secara ideal, kebijakan pemerintah diharapkan menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Institutional Theory menjelaskan bahwa organisasi menyesuaikan struktur, kebijakan, dan praktik bisnisnya dengan aturan, norma, serta tekanan institusional dari lingkungan eksternal (DiMaggio & Powell, 1983). Dalam konteks UMKM, kebijakan pemerintah dapat menjadi bentuk *coercive pressure* yang memengaruhi aktivitas dan strategi usaha. Sementara itu, Resource Based View (RBV) menempatkan sumber daya internal sebagai dasar keunggulan kompetitif (Barney, 1991) (Wernerfelt, 1984). Modal kerja menjadi salah satu sumber daya penting yang memungkinkan UMKM memenuhi kebutuhan operasional, menjaga likuiditas, membeli bahan baku, dan mempertahankan keberlangsungan usaha (Barney, 1991) (Wernerfelt, 1984).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten, dan menemukan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM (Sombolayuk, 2023) (Farhan et al., 2023) (Sari, 2024), sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM (Pramestiningrum & Iramani, 2020) (Widiarti, 2022) (Supriadi et al., 2022) (Dewi et al., 2022). Pada variabel modal kerja, penelitian terdahulu menemukan pengaruh positif dan signifikan (Putri & Setyawan, 2024) (Reski, 2022) (Sudirman et al., 2021), sedangkan penelitian lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau negatif (Bakari et al., 2024) (Manalu et al., 2024) (Hamzah et al., 2023) (Jalaliah et al., 2022).

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kebijakan pemerintah dan modal kerja terhadap kinerja UMKM. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji kebijakan pemerintah dalam bentuk dukungan modal, pelatihan, kemudahan perizinan, atau pemberdayaan UMKM, sedangkan penelitian ini menempatkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai konteks kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini juga menguji kebijakan pemerintah sebagai faktor eksternal dan modal kerja sebagai faktor internal secara bersamaan terhadap kinerja keuangan UMKM (Prasannath et al., 2024) (Zulu Chisanga et al., 2020).

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengujian empiris mengenai pengaruh kebijakan pemerintah dan modal kerja terhadap kinerja keuangan UMKM makanan dan minuman dalam konteks implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan Institutional Theory untuk menjelaskan faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah dan Resource Based View untuk menjelaskan modal kerja sebagai sumber daya internal UMKM.

Penggabungan kedua faktor tersebut memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam memahami kinerja keuangan UMKM. Kebijakan pemerintah menggambarkan faktor lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi kondisi usaha, sedangkan modal kerja menggambarkan kemampuan internal UMKM dalam mengelola sumber daya keuangannya. Dengan menguji kedua variabel tersebut secara parsial maupun simultan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja keuangan UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kuningan.

Penelitian ini memiliki kontribusi pada konteks empiris karena secara khusus mengkaji UMKM sektor makanan dan minuman di Kabupaten Kuningan dalam kondisi implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis. Fokus tersebut memungkinkan penelitian memberikan gambaran mengenai bagaimana pelaku UMKM merespons perubahan lingkungan usaha sekaligus bagaimana kemampuan pengelolaan modal kerja berperan dalam mendukung kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh

kebijakan pemerintah terhadap kinerja keuangan UMKM serta menganalisis pengaruh modal kerja terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Kuningan Jawa Barat (Ghozali, 2021).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji pengaruh kebijakan pemerintah dan modal kerja terhadap kinerja keuangan UMKM sektor makanan dan minuman. Pendekatan asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel independen, yaitu kebijakan pemerintah dan modal kerja, terhadap variabel dependen berupa kinerja keuangan UMKM. Analisis data dilakukan dengan bantuan IBM SPSS Statistics (Creswell & Creswell, 2021).

Populasi penelitian adalah pelaku UMKM sektor makanan dan minuman yang terpengaruh oleh Program Makan Bergizi Gratis di wilayah penelitian. Jumlah populasi tersebut tidak diketahui secara pasti sehingga ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Lemeshow. Berdasarkan perhitungan, jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 97 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria: (1) pelaku UMKM sektor makanan dan minuman; (2) UMKM beroperasi di wilayah penelitian; (3) UMKM mengetahui atau merasakan dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap aktivitas usahanya; dan (4) UMKM telah menjalankan usaha minimal satu tahun. Dalam pelaksanaan penelitian diperoleh 145 responden. Setelah proses *data screening*, ditemukan empat data yang teridentifikasi sebagai *outlier*. Keempat data tersebut dikeluarkan sehingga jumlah observasi yang digunakan dalam analisis statistik menjadi 141 responden.

Penelitian dilaksanakan pada UMKM sektor makanan dan minuman di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan pelaku UMKM dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Data primer diperoleh secara langsung melalui kuesioner kepada pelaku UMKM sektor makanan dan minuman, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, artikel ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, modal kerja, dan kinerja keuangan UMKM. Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian. Pengukuran menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. Variabel kinerja keuangan UMKM diukur melalui pertumbuhan usaha, pertumbuhan modal, pertumbuhan pendapatan, serta pertumbuhan pasar dan pemasaran. Kebijakan pemerintah diukur melalui dukungan pemerintah, dampak kebijakan terhadap penjualan dan aktivitas usaha, perubahan permintaan, serta dampak terhadap pendapatan. Modal kerja diukur melalui ketersediaan dana operasional, kemampuan membeli bahan baku, kelancaran arus kas, dan kemampuan memenuhi kebutuhan operasional (Sekaran & Bougie, 2020).

Data yang terkumpul terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan kelayakannya sebelum digunakan dalam analisis. Dari 145 responden yang berhasil dikumpulkan, dilakukan pemeriksaan terhadap data penelitian dan ditemukan empat data *outlier* yang kemudian dikeluarkan dari analisis akhir. Dengan demikian, jumlah observasi yang digunakan dalam pengujian regresi dan analisis statistik selanjutnya adalah 141 observasi. Proses tersebut dilakukan agar model analisis yang digunakan dapat memberikan hasil yang lebih sesuai dengan karakteristik data penelitian.

Pemilihan responden dilakukan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu pelaku UMKM yang bergerak pada sektor makanan dan minuman di Kabupaten Kuningan. Penggunaan *purposive sampling* memungkinkan peneliti memperoleh responden yang memiliki karakteristik sesuai dengan variabel penelitian, khususnya berkaitan dengan pengalaman menjalankan usaha dan kemampuan memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah, modal kerja, serta kondisi kinerja keuangan usaha.

Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics. Tahapan analisis meliputi uji validitas, uji reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji F, uji t, dan koefisien determinasi. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Model regresi yang digunakan adalah: $(Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e)$ Keterangan: Y = kinerja keuangan UMKM; X_1 = kebijakan pemerintah; X_2 = modal kerja; a = konstanta; b_1 dan b_2 = koefisien regresi; e = residual (Ghozali, 2021).

Variabel Kebijakan Pemerintah diukur berdasarkan persepsi responden terhadap dukungan dan dampak kebijakan pemerintah terhadap kegiatan usaha. Pengukuran tersebut mencakup dukungan pemerintah, pengaruh kebijakan terhadap penjualan, perubahan permintaan yang berkaitan dengan kebijakan, serta dampaknya terhadap pendapatan atau keuntungan usaha. Variabel Modal Kerja diukur melalui kemampuan menyediakan dana untuk

kegiatan operasional, kemampuan membeli bahan baku, kelancaran arus kas, dan kemampuan memenuhi kebutuhan operasional usaha.

Sementara itu, Kinerja Keuangan UMKM diukur melalui beberapa indikator yang menggambarkan perkembangan usaha, yaitu pertumbuhan usaha, pertumbuhan modal, pertumbuhan pendapatan, serta perkembangan pasar atau pemasaran. Seluruh indikator tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi variabel penelitian berdasarkan persepsi pelaku UMKM sebagai responden.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian memperoleh 145 responden sebelum dilakukan *data screening*. Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis usaha, lokasi usaha, lama menjalankan usaha, dan jumlah tenaga kerja.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	49	33,8%
	Perempuan	96	66,2%
Usia	<20 tahun	19	13,1%
	20–30 tahun	104	71,7%
	31–40 tahun	17	11,7%
	41–50 tahun	5	3,4%
Pendidikan	SD/ sederajat	2	1,4%
	SMP/ sederajat	17	11,7%
	SMA/ sederajat	90	62,1%
	Diploma (D3)	10	6,9%
Jenis usaha	Sarjana (S1)	26	17,9%
	Makanan	86	59,3%
	Makanan dan minuman	37	25,5%
Lama usaha	Minuman	22	15,2%
	<1 tahun	52	35,9%
	1–3 tahun	85	58,6%
Tenaga kerja	>3 tahun	8	5,5%
	<2 orang	91	62,8%
	>2 orang	54	37,2%

Sumber: Data diolah, 2026.

Karakteristik responden menunjukkan bahwa pelaku UMKM makanan dan minuman dalam penelitian memiliki latar belakang yang beragam. Komposisi responden didominasi oleh perempuan dan kelompok usia 20–30 tahun. Dari sisi pendidikan, sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan SMA. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas UMKM makanan dan minuman dalam penelitian banyak dijalankan oleh pelaku usaha usia produktif dengan latar belakang pendidikan menengah.

Berdasarkan jenis usaha, UMKM makanan merupakan kelompok yang paling banyak ditemukan dibandingkan usaha makanan dan minuman maupun usaha minuman. Sementara itu, berdasarkan lama usaha, sebagian besar responden telah menjalankan usahanya selama 1–3 tahun. Dari sisi tenaga kerja, mayoritas usaha memiliki kurang dari dua karyawan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar unit usaha yang menjadi objek penelitian masih berada pada skala usaha yang relatif kecil dengan struktur tenaga kerja yang terbatas. Responden berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kuningan. Responden terbanyak berasal dari Kecamatan Kuningan

sebanyak 35 responden (24,1%), diikuti Cidahu sebanyak 15 responden (10,3%), Cilimus sebanyak 12 responden (8,3%), dan Jalaksana sebanyak 10 responden (6,9%).

Data screening dan statistik deskriptif dari 145 kuesioner yang terkumpul, terdapat empat data *outlier* sehingga data yang digunakan untuk analisis selanjutnya berjumlah 141 responden.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Kebijakan Pemerintah (X_1)	10	40	30,23	4,627
Modal Kerja (X_2)	14	39	31,20	3,820
Kinerja Keuangan UMKM (Y)	9	40	31,04	4,304

Sumber: Output SPSS versi 25, data diolah, 2026.

Hasil statistik deskriptif memberikan gambaran awal mengenai kondisi masing-masing variabel penelitian. Variabel Kebijakan Pemerintah memiliki nilai minimum 10 dan maksimum 40 dengan nilai rata-rata sebesar 30,23 dan standar deviasi 4,627. Variabel Modal Kerja memiliki nilai minimum 14 dan maksimum 39 dengan rata-rata sebesar 31,20 dan standar deviasi 3,820. Sementara itu, Kinerja Keuangan UMKM memiliki nilai minimum 9 dan maksimum 40 dengan rata-rata sebesar 31,04 dan standar deviasi 4,304.

Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap ketiga variabel penelitian berada pada tingkat yang relatif baik berdasarkan rentang pengukuran yang digunakan. Namun, hasil deskriptif tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya pengaruh antarvariabel. Pengujian lebih lanjut melalui regresi linear berganda diperlukan untuk mengetahui arah dan signifikansi pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Modal Kerja terhadap Kinerja Keuangan UMKM.

Uji Validitas dan Reliabilitas dari seluruh item pernyataan pada variabel kebijakan pemerintah, modal kerja, dan kinerja keuangan UMKM memiliki nilai *r hitung* lebih besar daripada *r tabel* sebesar 0,163 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian, seluruh item dinyatakan valid.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Kebijakan Pemerintah (X_1)	0,738	$\geq 0,70$	Reliabel
Modal Kerja (X_2)	0,741	$\geq 0,70$	Reliabel
Kinerja Keuangan UMKM (Y)	0,765	$\geq 0,70$	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2026.

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian memenuhi kriteria validitas. Dengan demikian, setiap item yang digunakan dapat merepresentasikan konstruk variabel yang diukur. Hasil tersebut memberikan dasar bahwa instrumen penelitian dapat digunakan untuk memperoleh data mengenai Kebijakan Pemerintah, Modal Kerja, dan Kinerja Keuangan UMKM.

Pengujian reliabilitas juga menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas batas 0,70. Variabel Kebijakan Pemerintah memiliki nilai alpha sebesar 0,738, Modal Kerja sebesar 0,741, dan Kinerja Keuangan sebesar 0,765. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang memadai sehingga data yang diperoleh dapat dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya.

Pada uji asumsi klasik, data awal menyebutkan sebanyak 145 responden, uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan *Test Statistic* sebesar 0,105 dengan signifikansi 0,000 sehingga residual belum berdistribusi normal. Setelah empat data *outlier* dikeluarkan, nilai signifikansi menjadi 0,200 sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Hasil	Kesimpulan
Normalitas sebelum outlier	Sig. = 0,000	Belum normal
Normalitas setelah outlier	Sig. = 0,200	Normal
Multikolinearitas	Tolerance = 0,786; VIF = 1,272	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas X ₁	Sig. Glejser = 0,105	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas X ₂	Sig. Glejser = 0,433	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS versi 25, data diolah, 2026.

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model penelitian memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisis regresi linear berganda. Pada pengujian normalitas, nilai signifikansi setelah pengeluaran data outlier mencapai 0,200 sehingga telah memenuhi kriteria normalitas. Pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance sebesar 0,786 dan VIF sebesar 1,272. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas yang mengganggu model penelitian.

Selanjutnya, pengujian heteroskedastisitas melalui metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,105 untuk Kebijakan Pemerintah dan 0,433 untuk Modal Kerja. Kedua nilai tersebut berada di atas 0,05 sehingga tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Dengan terpenuhinya pengujian asumsi tersebut, model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap Kinerja Keuangan UMKM.

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan regresi: $(Y = -0,406 + 0,400X_1 + 0,621X_2 + e)$ Koefisien kebijakan pemerintah sebesar 0,400 menunjukkan arah positif, sedangkan koefisien modal kerja sebesar 0,621 juga menunjukkan arah positif.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.	Keputusan
Kebijakan Pemerintah (X ₁)	0,400	8,264	0,000	H1 diterima
Modal Kerja (X ₂)	0,621	10,597	0,000	H2 diterima

Sumber: Data diolah, 2026.

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai sebesar 166,445 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dan modal kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM dan model regresi dinyatakan layak digunakan.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate
0,841	0,707	0,703	2,347

Sumber: Output SPSS versi 25, data diolah, 2026.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,703 menunjukkan bahwa 70,3% variasi kinerja keuangan UMKM dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh kebijakan pemerintah dan modal kerja, sedangkan 29,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

3.1. Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Hasil tersebut ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,400, nilai t sebesar 8,264, dan signifikansi 0,000. Dengan demikian, H1 diterima. Artinya, semakin baik penilaian pelaku UMKM terhadap kebijakan pemerintah yang berlaku, semakin tinggi pula kinerja keuangan yang dicapai.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan dan implementasi kebijakan pemerintah dapat menjadi bagian dari lingkungan kelembagaan yang memengaruhi aktivitas UMKM. Pelaku usaha tidak menjalankan kegiatan bisnis secara terpisah dari lingkungan eksternal, tetapi harus menyesuaikan keputusan usaha dengan berbagai perubahan yang terjadi. Dalam perspektif Institutional Theory, kondisi tersebut dapat dipahami melalui adanya tekanan dan perubahan lingkungan kelembagaan yang mendorong organisasi atau pelaku usaha melakukan penyesuaian.

Dalam konteks penelitian ini, pengaruh positif menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang diamati oleh responden lebih banyak dipersepsikan memberikan peluang dibandingkan hambatan terhadap kegiatan usaha. Kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan perubahan permintaan, peluang keterlibatan dalam aktivitas penyediaan makanan, serta perubahan aktivitas ekonomi di sekitar UMKM. Dengan demikian, kemampuan pelaku usaha dalam merespons kebijakan menjadi bagian penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya hubungan antara dukungan pemerintah dengan perkembangan atau kinerja UMKM. Namun, hasil penelitian ini perlu dipahami dalam konteks objek penelitian karena dampak kebijakan pemerintah dapat berbeda pada wilayah dan sektor usaha yang berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan UMKM dalam memanfaatkan perubahan lingkungan usaha.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menemukan adanya pengaruh positif kebijakan pemerintah terhadap kinerja UMKM (Sombolayuk, 2023) (Farhan et al., 2023) (Sari, 2024). Hasil penelitian juga sejalan dengan salah satu penelitian yang menempatkan kebijakan pemerintah sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi kondisi internal usaha (Ritonga & Dewi 2023). Sebaliknya, hasil penelitian ini berbeda dengan dengan penelitian lainnya yang menemukan bahwa kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM (Pramestiningrum & Iramani, 2020) (Widiarti, 2022) (Supriadi et al., 2022) (Dewi et al., 2022).

Dalam penelitian ini, kebijakan pemerintah diukur melalui dukungan pemerintah terhadap UMKM, dampak kebijakan terhadap penjualan dan aktivitas usaha, perubahan permintaan, serta dampak terhadap pendapatan dan keuntungan usaha yang dikaitkan dengan Program Makan Bergizi Gratis. Nilai rata-rata variabel kebijakan pemerintah sebesar 30,23 menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian yang cenderung positif terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan UMKM.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Institutional Theory, yang memandang bahwa organisasi menghadapi tekanan institusional dari lingkungan eksternal, termasuk tekanan yang berasal dari kebijakan pemerintah (DiMaggio & Powell, 1983). Dalam konteks penelitian ini, kebijakan pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari lingkungan eksternal yang mendorong UMKM menyesuaikan aktivitas dan strategi usahanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons UMKM terhadap kebijakan tersebut secara keseluruhan berkaitan positif dengan kinerja keuangan. Temuan ini juga sejalan dengan salah satu penelitian lainnya tentang pentingnya dukungan dan kebijakan pemerintah bagi kondisi usaha UMKM (Zulu Chisanga et al., 2020) (Prasannath et al., 2024).

3.2. Pengaruh Modal Kerja terhadap Kinerja Keuangan UMKM

Modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Hasil uji t menunjukkan nilai t sebesar 10,597 dengan signifikansi 0,000 dan koefisien regresi sebesar 0,621, sehingga H2 diterima. Koefisien modal kerja lebih besar daripada koefisien kebijakan pemerintah, yang menunjukkan bahwa modal kerja memberikan kontribusi relatif lebih besar terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM pada objek penelitian.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan UMKM dalam menyediakan dan mengelola modal kerja memiliki peranan penting dalam menjaga kegiatan operasional. Modal kerja memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli bahan baku, menjaga kelancaran arus kas, serta mempertahankan kontinuitas kegiatan produksi dan penjualan. Ketika kebutuhan modal kerja dapat dipenuhi dengan baik, UMKM memiliki kemampuan yang lebih besar untuk merespons kebutuhan usaha dan perubahan kondisi pasar.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui Resource-Based View yang menempatkan sumber daya internal sebagai salah satu dasar kemampuan organisasi dalam menciptakan kinerja. Dalam konteks UMKM, modal kerja merupakan sumber daya finansial yang secara langsung mendukung kegiatan operasional. Pengelolaan modal kerja yang

memadai memungkinkan pelaku usaha menggunakan sumber daya tersebut secara lebih efektif untuk mempertahankan aktivitas usaha dan mendukung perkembangan kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian terdahulu yang menempatkan modal kerja sebagai salah satu faktor penting dalam kinerja UMKM. Meskipun demikian, kemampuan modal kerja dalam menghasilkan kinerja tetap dipengaruhi oleh bagaimana sumber daya tersebut dikelola. Modal yang tersedia tidak secara otomatis menghasilkan kinerja yang lebih baik apabila tidak digunakan secara efektif untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan usaha.

Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM (Putri & Setyawan, 2024) (Sudirman et al., 2021). Modal kerja yang memadai memungkinkan pelaku usaha menjaga kelancaran aktivitas operasional, seperti pengadaan bahan baku, pembayaran tenaga kerja, dan pemeliharaan stabilitas usaha.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang menemukan bahwa modal kerja tidak berpengaruh signifikan atau memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja UMKM (Bakari et al., 2024) (Manalu et al., 2024) (Hamzah et al., 2023) (Jalaliah et al., 2022). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh modal kerja dapat berkaitan dengan karakteristik objek, kondisi usaha, serta konteks lingkungan bisnis yang diteliti.

Temuan mengenai modal kerja memperkuat relevansi Resource Based View (RBV), yang menempatkan sumber daya internal sebagai dasar bagi penciptaan keunggulan kompetitif (Barney, 1991) (Wernerfelt, 1984). Dalam konteks UMKM, modal kerja merupakan sumber daya yang mendukung kelancaran operasional dan kemampuan usaha dalam merespons perubahan lingkungan. Kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola kas, piutang, persediaan, dan kebutuhan operasional menjadi bagian penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan.

Hasil pengujian simultan memperlihatkan bahwa Kinerja Keuangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan satu faktor, tetapi dapat dipahami melalui kombinasi faktor eksternal dan internal. Kebijakan Pemerintah merepresentasikan kondisi lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi aktivitas usaha, sedangkan Modal Kerja merepresentasikan sumber daya internal yang digunakan untuk menjalankan aktivitas tersebut. Keduanya secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap variasi Kinerja Keuangan UMKM dalam model penelitian.

Hubungan tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kemampuan UMKM dalam merespons lingkungan eksternal dan kemampuan dalam mengelola sumber daya internal. Kebijakan yang memberikan peluang belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal apabila UMKM memiliki keterbatasan modal kerja. Sebaliknya, modal kerja yang memadai juga perlu didukung oleh kemampuan pelaku usaha dalam merespons perubahan lingkungan bisnis dan kebijakan pemerintah.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,703 menunjukkan bahwa kedua variabel independen dalam model mampu menjelaskan 70,3% variasi Kinerja Keuangan UMKM, sedangkan 29,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah dan Modal Kerja memiliki kemampuan penjelasan yang cukup kuat dalam model yang digunakan, tetapi belum mencakup seluruh faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan UMKM.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah dan faktor internal berupa modal kerja sama-sama berperan dalam menjelaskan kinerja keuangan UMKM. Model penelitian memiliki kemampuan menjelaskan 70,3% variasi kinerja keuangan berdasarkan nilai Adjusted R Square. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kedua variabel yang diteliti secara bersama-sama memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja keuangan UMKM pada objek penelitian.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah dan modal kerja terhadap kinerja keuangan UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, dengan kebijakan pemerintah dalam penelitian ini secara khusus mengacu pada implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penilaian pelaku UMKM terhadap

kebijakan pemerintah yang berlaku, termasuk Program Makan Bergizi Gratis dan kebijakan pendukung UMKM lainnya, semakin tinggi pula kinerja keuangan yang mampu dicapai oleh pelaku usaha. Modal kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM, dengan kontribusi yang relatif lebih besar dibandingkan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola kas, piutang, dan persediaan secara efektif menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional serta meningkatkan kinerja usaha. Secara keseluruhan, hasil penelitian memperkuat relevansi Institutional Theory dan Resource Based View (RBV) dalam menjelaskan kinerja keuangan UMKM. Kebijakan pemerintah berperan sebagai tekanan institusional yang membentuk kondisi eksternal usaha, sedangkan modal kerja berperan sebagai sumber daya internal yang menentukan kemampuan pelaku usaha dalam merespons kondisi tersebut secara optimal. Bagi pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Kabupaten Kuningan, pengelolaan modal kerja perlu ditingkatkan secara efektif, khususnya dalam mengatur kas, piutang, dan persediaan. Pelaku UMKM juga disarankan untuk memanfaatkan peluang keterlibatan sebagai mitra penyedia bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis serta melakukan adaptasi strategi usaha untuk menghadapi perubahan pola permintaan. Bagi pemerintah, kebijakan yang mendukung keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis perlu terus dioptimalkan secara lebih merata. Pemerintah juga disarankan memberikan pendampingan dan pelatihan pengelolaan modal kerja bagi pelaku UMKM yang terdampak perubahan pola konsumsi. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain yang relevan, memperluas wilayah atau sektor usaha, serta mempertimbangkan pendekatan longitudinal untuk mengamati dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap kinerja UMKM secara berkelanjutan.

Reference

1. Amram, N. R., Habidin, N. F., & Basri, M. F. (2023). The relationship between working capital management and business performance in Malaysia SMEs family business, 13(9), 898–907. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i9/17910>
2. Bakari, S. M. A. B., Abdul, I., & S. Dai, S. I. (2024). Determinan kinerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM): Determinants of micro, small and medium enterprises (SMEs) performance, 7(1), 23–39.
3. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *International Business Strategy: Theory and Practice*, 283–301. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199277681.003.0003>
4. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
5. DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
6. Dewi, A. K. S., Supartini, & Syahriar. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM (Studi kasus pada pelaku UMKM di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen).
7. Farhan, A., Ramadhani, S., & Yanti, N. (2023). Pengaruh aspek keuangan, financial technology, kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(30), 640–661. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i1.18223>
8. Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*.
9. Hamzah, R. S., Gozali, E. O. D., Efriandy, I., & Gusmiati, D. M. (2023). Pengelolaan modal kerja, literasi keuangan dan performa UMKM, 12(2), 177–188.
10. Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*. Pustaka Ilmu.
11. Hidayatullah, I. (2020). Pengaruh inklusi keuangan, literasi keuangan, dan kemampuan menyusun laporan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM Kabupaten Tegal.
12. Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Metode penelitian*.
13. Jalaliah, Wulandari, H. K., & Dumadi. (2022). Pengaruh modal kerja, tenaga kerja, dan bahan baku terhadap pendapatan UMKM pabrik tahu (Studi empiris UMKM tahu Kecamatan Banjarharjo periode tahun 2019–2021), 1(1), 68–78.
14. Kurnianty, J., & Sitorus, R. R. (2023). Pengaruh modal, dukungan pemerintah, kompetensi SDM, dan produktivitas kerja terhadap kinerja UMKM, 6(1), 260–270. <https://doi.org/10.32493/frkm.v6i1.29009>
15. Manalu, J. P., Meutia, T., & Mayang Murni. (2024). Pengaruh penerapan ekonomi digital, ketersediaan modal kerja, literasi keuangan, terhadap kinerja UMKM di Kota Langsa, 4(1), 1029–1047.
16. Pramestinigrum, D. R., & Iramani, R. (2020). Pengaruh literasi keuangan, financial capital, dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja usaha pada usaha kecil dan menengah di Jawa Timur.
17. Prasannath, V., Adhikari, R. P., Gronum, S., & Miles, M. P. (2024). Impact of government support policies on entrepreneurial orientation and SME performance. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 20(3), 1533–1595. <https://doi.org/10.1007/s11365-024-00993-3>
18. Putri, A. C. S., & Setyawan, I. R. (2024). Pengaruh modal kerja dan akses pendanaan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 8(1), 228–240.
19. Rahmadani, R. (2022). Pengaruh latar belakang pendidikan, lama usaha dan ukuran usaha terhadap kualitas laporan keuangan UMKM, 2(2).
20. Reski. (2022). Pengaruh jumlah tenaga kerja, modal kerja terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia.
21. Ritonga, M. P., & Dewi, K. (2023). Analisis faktor yang mempengaruhi kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tebing Tinggi, 1(4), 10–19.
22. Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*.
23. Sari, I. A. B. P. K. (2024). Pengaruh kebijakan pemerintah dan modal sosial terhadap kinerja UMKM se-Kabupaten Badung.
24. Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research methods for business: A skill-building approach*. John Wiley & Sons.
25. Sidabutar, J. S., Siahaan, A. M., & Sinurat, M. (2025). Pengaruh modal kerja dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM (Studi kasus pada pelaku UMKM di Kecamatan Medan Tembung), 4(1), 73–86.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13350>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

26. Sombolayuk, W. (2023). The influence of government policies on the performance of SME companies (Empirical study of SMEs in Makassar City), 21(01), 37–55.
27. Sudirman, Sadapotto, A., & Asrifan, A. (2021). Pengaruh jumlah tenaga kerja, modal kerja terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia, 1–14.
28. Supriadi, Rodiah, S., & Suriyanti, L. H. (2022). Determinan kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Pekanbaru Kota, 12(2), 297–309.
29. Syahadatina, R., & Bustaram, I. (2022). Pengaruh tingkat pendidikan dan penggunaan informasi akuntansi terhadap keberhasilan UMKM, 6(2), 280–285.
30. Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management, 18, 509–533.
31. Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, 5(2), 171–180.
32. Wibawa, H. W., & Ali, H. M. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM, 5(3), 650–660.
33. Widiarti, S. T. (2022). Peran inovasi, literasi keuangan, modal kerja dan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja UKM. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (JMBI UNSRAT)*, 9(3), 1359–1371.
34. Zulu Chisanga, S., Chabala, M., & Mandawa Bray, B. (2020). The differential effects of government support, inter-firm collaboration and firm resources on SME performance in a developing economy. <https://doi.org/10.1108/JEEE-07-2019-0105>